# LAPORAN MAGANG

# PERANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN KLATEN DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN UMKM DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN


**Disusun Oleh:**

**Nama:** **Isnaini Wahyu Annafi**

**No Mahasiswa:** **19211071**

**Program Studi:** **Manajemen**



**Program Studi Manajemen Program Diploma III**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2023**

# PERANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN KLATEN DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN UMKM DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN

**LAPORAN MAGANG**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia**

**Disusun oleh:**
**Isnaini Wahyu Annafi**
**19211071**

**Program Studi Manajemen Program Diploma III**
**Fakultas Bisnis dan Ekonomika**
**Universitas Islam Indonesia**
**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

# PERANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN KLATEN DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN UMKM DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN

**Disusun Oleh:**

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | **Isnaini Wahyu Annafi** |
| **No Mahasiswa** | : | **19211071** |
| **Program Studi** | : | **Manajemen** |

***Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing***

**Pada Tanggal: 11 Mei 2023**

**Dosen Pembimbing**

(Sunardi, SE., M. Si.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**PERANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN KLATEN DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN UMKM DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN**

**DisusunOleh:**

**Nama : ISNAINI WAHYU**

**ANoMahasiswa : 19211071**

**ProgramStudi : D3 MANAJEMEN**

**Tim Penguji**

| Penguji 1 | Penguji 2 |
| --- | --- |
| Arief Darmawan, SE.,MM | Sukardi, SE., M.Si. |

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi D3 Manajemen**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS EKONOMI

**Andriyastuti Suratman,SE.,MM**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku".

Yogyakarta, 31 Mei 2023

Penulis,

Isnaini Wahyu Annafi

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan tugas akhir ini berjudul "PERANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN KLATEN DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN UMKM DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN", Berlokasi di BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten yang beralamat Jl. Pemuda, Gd. II, No. 290, Tegalyoso, Klaten Selatan, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan periode pelaksanaan magang pada tanggal 1 Februari 2023 s/d 1 Maret 2023, Laporan tugas akhir ini berisi mengenai peranan Bappedalitbang dalam perencanaan pembangunan UMKM .

Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, nikmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

2. Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umatnya.
3. Kedua orang tua penulis Bapak Budana dan Ibu Siti Sriyamti yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan semangat sehingga membuat penulis termotivasi penuh untuk menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu dengan harapan membanggakan mereka berdua.
4. Bapak Arief Darmawan, SE, MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Sukardi, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukannya agar bisa menyelesaikan tugas akhir dengan tepat..
6. Ibu Khoirina Noor Anindya, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis dan senantiasa memberikan bimbingan dan pendampingan semasa saya kuliah Program Studi Manajemen Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak/Ibu Dosen Manajemen Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. BAPPEDALITBANG KABUPATEN KLATEN yang telah memberikan kesempatan untuk magang dan membantu dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Bapak Pandu Wirabangsa, SH., M.Eng selaku Sekretaris Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan di Kantor Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Klaten yang telah menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan program magang pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Klaten.

10. Bapak Trimo Trijoko, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Klaten yang telah menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan program magang pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Klaten.
11. Ibu Endah Kusmariyah, S.E, M.Si selaku Kepala Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Klaten yang telah menerima, membimbing, dan memberikan informasi kepada penulis sebagai mahasiswa untuk menjalankan kegiatan magang di Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Klaten.

12. Bapak Sutrisno, ST, M.Si selaku Kepala Sub Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Klaten yang telah menerima, membimbing, dan memberikan informasi kepada penulis sebagai mahasiswa untuk menjalankan kegiatan.
13. Bapak dan Ibu Pegawai di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Klaten yang telah membantu untuk mengarahkan atau memberikan bimbingan kepada penulisdalam melaksanakan kegiatan magang.
14. Seluruh karyawan dan staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Klaten yang selalu menerima penulis dan selalu ramah dalam kesehariannya Sahabat dan teman yang telah membantu memberikan ide dan memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Terimakasih kepada Jodian Lutfhi, Ferry Indrianto, Ranangga Febrian, Ade Satrio, Rizki Dwi Kurniawan, Izmi Nur Fauziah, Ayu Fitri Mabarroh, Yasinta Rizki Salsabila, dan Syifaus Salsabila, yang telah membantu memberikan ide dan memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Segenap kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Mei 2023

Penulis,

Isnaini Wahyu Annafi

# ABSTRAK

Dalam perwujudan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan daerahnya secara mandiri. Sebagai prasyarat untuk memulai pembangunan, pemerintah daerah melakukan perencanaan pembangunan yang cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ciri khas dari daerah masing-masing. Hal ini menjadi alat penilaian yang sangat penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong kemajuan daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah membuat peraturan dan pedoman pembentukan Badan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Daerah (BAPPEDALITBANG) sebagai perangkat perencanaan pembangunan serta pengembangan daerah yang seimbang dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan dan kendala BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten dalam merencanakan pembangunan UMKM. Instrumen metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan metode Observasi dan Studi Kepustakaan yang diambil dari bebagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BAPPEDALITBANG adalah sebagai fasilitator dalam memberikan bantuan dan pelatihan yang bertujuan untuk memajukan serta mengembangankan UMKM di wilayah Kabupaten Klaten.



**Kata kunci**: Pembangunan Daerah, Perencanaan, Peranan BAPPEDALITBANG, UMKM.

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **ii**

**PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN** ..... **iiv**

**KATA PENGANTAR** ..... **v**

**ABSTRAK** ..... **x**

**DAFTAR ISI** ..... **xi**

**DAFTAR TABEL** ..... **xv**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xvi**

**BAB I** ..... **1**

**PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Dasar Pemikiran Magang ..... 1

1.2 Tujuan Magang ..... 4

1.3 Target Magang ..... 5

1.4 Bidang Magang ..... 5

1.4.1 Bidang Magang ..... 5

1.4.2 Lokasi Magang ..... 5

1.4.3 Jenis dan Sumber Data ..... 6

1.5 Metode Pengumpulan Data ..... 6

1.6 Jadwal Magang ..... 7

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang ..... 8

**BAB II ..... 9**

**LANDASAN TEORI ..... 9**

**BAB I ..... 9**

**BAB II ..... 9**

**BAB II ..... 9**

2.1 Peranan ..... 9

2.1.1 Definisi Peranan ..... 9

2.2 Perencanaan ..... 11

2.2.1 Definisi Perencanaan ..... 11

2.3 Pembangunan ..... 12

2.3.1 Definisi Pembangunan ..... 12

2.4 Perencanaan Pembangunan ..... 13

2.4.1 Definisi Perencanaan Pembangunan ..... 13

2.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ..... 14

2.5.1 Definisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) .. 14

2.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ..... 17

2.6.1 Definisi UMKM ..... 17

2.6.2 Kriteria UMKM ..... 18

2.6.3 Klasifikasi UMKM ..... 19

2.6.4 Karakteristik Usaha Mikro ..... 20

2.7 Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM ..... 21

**BAB III ..... 24**

**ANALISIS DESKRIPTIF ..... 24**

**BAB III ..... 24**

**BAB III ..... 24**

3.1 Data Umum ..... 24

3.1.1 Sejarah BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten ..... 24

3.1.2 Struktur Organisasi Bappeda Klaten ..... 25

3.1.3 Visi dan Misi Bappedalitbang Klaten ..... 27

3.1.4 Logo BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten ..... 29

3.1.5 Struktur Organisasi ..... 31

3.1.6 Tugas dan Wewenang Bappedalitbang Klaten ..... 32

3.2 Data Khusus ..... 37

3.2.1 Peranan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten dalam Merencanakan Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah. ..... 37

3.2.2 Kendala yang Dialami Bappedalitbang Kabupaten Klaten Dalam Merencanakan Pembangunan UMKM ..... 40

**BAB IV ..... 42**

**KESIMPULAN DAN SARAN** ..... **42**

**BAB IV** ..... **42**

4.1 Kesimpulan ..... 42

3.2 Saran ..... 43

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **44**

**LAMPIRAN** ..... **47**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang ..... 7

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2016-2023 ..... 33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Lokasi Magang..... 6

Gambar 3. 1 Logo BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten..... 29

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi BAPPEDA..... 31

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Dasar Pemikiran Magang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berkembang yang sampai sekarang gencar melakukan pembangunan dan pengembangan didalam negeri untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut antara lain melindungi bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan agar dapat memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat menuju perubahan dari yang sebelumnya. Pembangunan adalah upaya nasional untuk mewujudkan majunya setiap daerah di Indonesia, pembangunan nasional ini sendiri berfungsi sebagai wadah bagi berbagai macam rencana pembangunan yang bersumber dari pembangunan daerah.

Untuk menjalankan pembangunan yang efektif, sangat penting untuk memiliki perencanaan pembangunan yang mencakup rencana jangka panjang, menengah dan juga tahunan. Rencana ini harus dijalankan dan dilakukan oleh entitas yang relevan baik dalam administrasi negara dan masyarakat, dengan tetap mengikutsertakan keterlibatan aktif masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan

daerah di Kabupaten Klaten adalah dengan membuat dan merencanakan aturan atau kaidah tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten sebagai perangkat perencanaan pembangunan serta pengembangan daerah. Keberadaan BAPPEDALITBANG di Kabupaten Klaten sangat berperan penting dalam mendorong pembangunan yang seimbang dan berkeadilan, dengan memberikan kebebasan mengatur daerahnya secara maksimal. BAPPEDALITBANG mempunyai tupoksi sebagai badan perencaaan pembangunan serta penlitian dan pengembangan Daerah di Klaten, mendesain pernecanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD setiap tahunnya. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten terdiri dari dua komponen penting yaitu kesepakatan kinerja yang mengharuskan kepala program dan atasan langsung mereka yakni Bupati dan Kepala Bappeda Klaten, untuk menandatanganinya, dan dokumen pendamping yang menguraikan target yang harus dicapai pada akhir tahun anggaran. Kesepakatan ini juga memuat pernyataan penetapan kinerja (PK) dan penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Klaten untuk periode 2023.

Berbicara mengenai pembangunan daerah tentunya tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Kian hari masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dan bisa bersaing dalam ekonomi yang perkembangannya semakin pesat. Ekonomi merupakan salah satu penunjang terciptanya kesejahteraan sosial. Namun, tidak dapat dipungkiri juga perekonomian dapat menyebabkan berbagai masalah. Untuk itu, dibutuhkan juga peranan-peranan dari sektor lain, bukan hanya

dari pelaku usaha namun dibutuhkan juga kebijakan-kebijakan dari pemeritah yang berpihak pada pelaku ekonomi dari berbagai golongan. Mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM. UMKM mengacu pada usaha mandiri, yang dilakukan oleh individu atau badan hukum di berbagai sektor ekonomi. Pada dasarnya, klasifikasi Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Menengah, dan Usaha Besar (UB) ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya nilai aset awal, omzet rata-rata setiap tahun, dan juga jumlah karyawan tetap. Namun, kriteria khusus yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM bervariasi dari satu negara ke negara lain, sehingga sulit untuk membandingkan signifikansi atau kontribusinya di berbagai negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah jenis unit usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan pendapatan penduduknya sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan manajemen dari bisnis-bisnis UMKM yang ada, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, terlindungi, dan berkembang melalui dukungan pemerintah. Seperti yang diungkapkan Tulus Tambunan pada tahun 2012, UMKM dapat berperan sebagai katalisator pembangunan masyarakat yang bermanfaat baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha itu sendiri. Untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, sangatlah penting untuk memberdayakan UMKM dengan tepat agar dapat mengatasi masalah yang akan terjadi agar perekonomian nasional tetap stabil kedepannya. Pada saat krisis ekonomi terjadi, stabilitas negara pastinya akan terancam dan perusahaan besar seringkali menjadi

yang pertama menderita. Namun, UMKM telah terbukti tangguh dan mudah beradaptasi dalam menghadapi krisis ekonomi dengan sumber daya dan kemampuan yang terbatas. Pasca krismon pada tahun 1998, pentingnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diakui setelah menunjukkan keampuhannya dalam melewati masa-masa sulit tersebut. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Biro Pusat, terlihat bahwa jumlah UMKM di Indonesia melonjak sejak krisis moneter pada 1998. Ini adalah bukti dedikasi pemerintah kita yang tak tergoyahkan, dicontohkan melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang khusus membahas mengenai UMKM. Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan serangkaian kebijakan dan insentif ekonomi yang ditujukan untuk mendorong perkembangan UMKM itu sendiri. (Kusnindar, 2018)

Berdasarkan konteks tersebut di atas, maka penulis berkeinginan kuat untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "PERANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN KLATEN DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN UMKM DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN".

## 1.2 Tujuan Magang

Penulis telah menjabarkan tujuan magang melalui judul yang telah dipilih sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Peranan Bappedalitbang Kabupaten Klaten dalam Merencanakan Pembangunan UMKM di Wilayah Kabupaten Klaten.
2. Untuk menganalisis kendala Bappedalitbang Kabupaten Klaten Dalam Merencanakan Pembangunan UMKM di Wilayah Kabupaten Klaten.

## 1.3 Target Magang

Dapat disimpulkan dari tujuan yang ditetapkan oleh penulis bahwa target yang diinginkan adalah sebagai berikut:

1. Mampu menganalisis Peranan Bappedalitbang Kabupaten Klaten dalam Merencanakan Pembangunan UMKM di Wilayah Kabupaten Klaten.
2. Mampu menganalisis kendala Bappedalitbang Kabupaten Klaten Dalam Merencanakan Pembangunan UMKM di Wilayah Kabupaten Klaten.

## 1.4 Bidang Magang

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan pemagangan, termasuk langkah-langkah dan metode yang terlibat yaitu sebagai berikut:

### 1.4.1 Bidang Magang

Bidang Magang yang diambil untuk melengkapi Tugas Akhir adalah Bidang Kewilayahan, Sumber Daya Alam, Perekonomian, dan Infrastruktur.

### 1.4.2 Lokasi Magang

Tempat pelaksanakan program magang berada di BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten terletak di Jl. Pemuda, Gd. II, No. 290, Tegalyoso, Klaten Selatan, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57424.

Peta lokasi dapat dilihat pada gambar 1.1

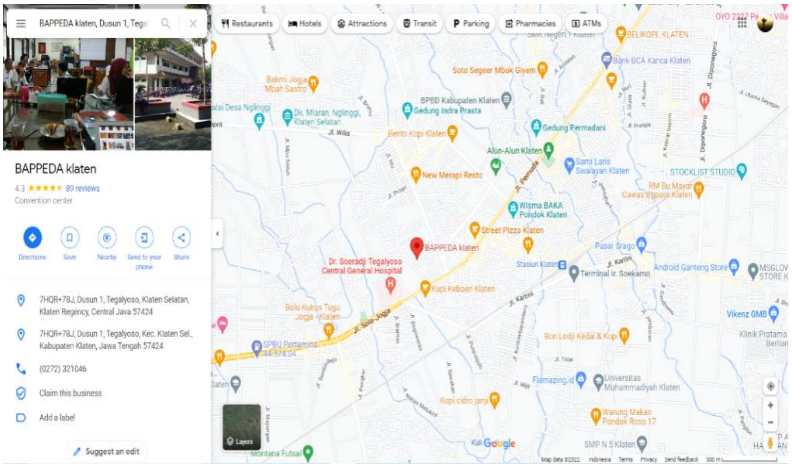


**Gambar 1. 1 Peta Lokasi Magang**

Sumber: *Googlemaps*

### 1.4.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

   Penulis memperoleh data secara langsung pada saat melakukan program magang di BAPPEDALITBANG KAB. KLATEN.

2. Data sekunder

   Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan tugas akhir penulis.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data Dalam menyusun laporan tersebut penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi.

   Penulis melakukan kegiatan observasi dengan mengamati secara langsung kegiatan magang di BAPPEDALITBANG KAB. KLATEN.

2. Studi kepustakaan.

   Penulis melakukan studi pustaka untuk menyusun laporan magang dari berbagai sumber meliputi buku, tesis, dan jurnal referensi yang berkaitan dengan BAPPEDALITBANG KAB. KLATEN.

## 1.6 Jadwal Magang

Tabel 1.1 menampilkan timeline pelaksanaan magang

**Tabel 1. 1**
**Jadwal Pelaksanaan Magang**

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Survei lokasi magang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan ToR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan kegiatan magang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyusunan literatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pengolahan data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Menyusun Laporan Magang dan bimbingan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ujian TA dan Ujian Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Proses pembuatan laporan magang dapat disegmentasi menjadi empat bagian berbeda.:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I adalah bab yang berisi tinjauan komprehensif tentang dasar pemikiran magang, tujuan dan sasaran magang, target magang, metodologi pelaksanaan magang, jadwal magang, serta struktur penulisan laporan magang.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II adalah bab yang membahas mengenai penjabaran teori yang menjadi dasar permasalahan dalam laporan magang dan digunakan sebagai acuan dalam memaparkan teori penulisan laporan magang.

BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF

Bab III adalah bab yang membahas mengenai bahasan tujuan magang. Pada bab III ini membahas mengenai gambaran umum dari pada Instansi tersebut.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV berisi kesimpulan hasil analisis bab sebelumnya dan juga saran kepada perusahaan agar selalyu berbenah demi perkembangan dan kemajuan daerah tersebut.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## 2.1 Peranan

### 2.1.1 Definisi Peranan

Menurut Sedarmayanti (2004:33), konsep peran penting dipahami dalam setiap kelompok atau organisasi mana pun, karena dengan memahami peranan dapat membantu individu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kejelasan peran seseorang dapat bervariasi yang nantinya mempengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Soekanto (2006:243) menyatakan bahwa peran adalah bagian dari status atau posisi seseorang yang selalu berubah-ubah. Jika seseorang memenuhi tanggung jawab dan tugasnya berdasarkan posisinya, maka mereka menjalankan peran mereka. Setiap individu memiliki peranan yang berbeda tergantung dari pengalaman yang sudah merek miliki selama ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 854) mendefinisikan peran sebagai seperangkat tindakan yang wajib dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam konteks masyarakat.

Peran adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan status sosial. Syarat peran tersebut terdiri dari tiga hal, yaitu:

1. Peran mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi di kehidupan bermasyarakat.
2. Peran mengacu pada bagaimana orang berperilaku dalam organisasi atau masyarakat tertentu.

3. Peran adalah aspek penting dari struktur sosial masyarakat karena berkaitan dengan perilaku individu.
4. Peran adalah aspek krusial yang bersumber dari posisi seseorang. Sifatnya dinamis dan terpenuhi ketika individu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaras dengan jabatannya.

Sedangkan menurut Riyadi (2002) peran adalah orientasi dan konsep yang dimainkan oleh pihak dalam oposisi sosial. Melalui peran itu, individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan lingkungan. Peran dapat disebut sebagai tuntutan struktural yang didalamnya memuat norma, harapan, tabu, dan tanggung jawab. Faktor-faktor ini menciptakan serangkaian tekanan dan kemudahan yang membantu pembimbing untuk mengatur dan melaksanakan tugasnya secara efektif. Pada hakekatnya, peran adalah seperangkat perilaku yang diperlihatkan oleh kelompok kecil maupun besar yang memungkinkan mereka menjalankan berbagai fungsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan atau manajemen. Hal ini juga menandakan perilaku spesifik yang diharapkan dari individu dalam konteks sosial tertentu. Jika istilah "peran" berkaitan dengan perilaku yang diproyeksikan seseorang dalam status tertentu, maka penting untuk dicatat bahwa peran tersebut mewakili perilaku sebenarnya dari orang yang menjalankannya. Pada dasarnya, peran dapat dilihat sebagai serangkaian tindakan tertentu yang didorong oleh posisi tertentu

## 2.2 Perencanaan

### 2.2.1 Definisi Perencanaan

Tarigan (2006: 13-14) mengemukakan bahwa ada berbagai macam perspektif untuk melihat jenis perencanaan. Ini termasuk perbedaan konten, perspektif perencanaan, pandangan bidang yang direncanakan, lembaga yang terlibat, manajemen atau koordinasi berbagai lembaga, dan kombinasi dari elemen-elemen ini. Terdapat berbagai jenis perencanaan yang dapat diklasifikasikan, namun jenis ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain dan bahkan dalam sektor yang berbeda di negara yang sama. Oleh karena itu, kombinasi berbagai jenis perencanaan sering diterapkan dalam satu negara. Tarigan menyebutkan berbagai jenis perencanaan yang telah dicetuskan oleh Glasson dalam bukunya "An Introduction to Regional Planning", yang meliputi kategori-kategori berikut:

- *Physical planning and economic planning*
- *Allocatibe and innovative planning*
- *Multi or single objectibe planning*
- *Indicative or imperative planning*

Selain itu, seperti yang dijelaskan Tarigan (2006: 13-18), di Indonesia terdapat berbagai pendekatan perencanaan antara lain perencanaan top-down dan bottom-up, perencanaan fisik dengan ekonomi, perencanaan inovatif dengan perencanaan alokatif, perencanaan tujuan tunggal versus multi-tujuan, perencanaan vertikal versus bottom-up, dan perencanaan horizontal versus

vertikal dan perencanaan yang melibatkan atau tidak melibatkan masyarakat secara langsung.

## 2.3 Pembangunan

### 2.3.1 Definisi Pembangunan

Dalam mendefinisikan pembangunan kita harus memandang pembangunan sebagai proses yang berkesinambungan daripada proses yang tetap. Pembangunan tidak terbatas pada tujuan atau kerangka waktu tertentu dan harus dilihat sebagai upaya berkelanjutan. Menurut penulis, para ahli telah mendefinisikan pembangunan diantara lain:

1. Fakih (2001:10)

   Fakih (2001:10) menjelaskan bahwa pembangunan merujuk pada istilah yang digunakan secara netral untuk menunjukkan proses dan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan berbagai aspek seperti infrastruktur masyarakat, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya.

2. Katz dan Yuwono (2001:47)

   Pengertian pembangunan menurut Katz dan Yuwono menjelaskan bahwa proses ini melibatkan transformasi signifikan dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang semakin menguntungkan, dengan pembangunan bangsa atau kemajuan sosial-ekonomi sebagai tujuan utamanya.

3. Effendi (2002:2)

   Menurut Effendi (2002: 2) mendefinisikan pembangunan sebagai pendekatan sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan semua sumber daya yang tersedia, dengan tetap memastikan

bahwa sumber daya tersebut dimanfaatkan secara adil dan merata. Hal ini mengandung arti bahwa pembangunan tidak boleh terbatas pada sektor atau kelompok tertentu saja, melainkan mencakup semua aspek masyarakat, termasuk bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik..

4. Galtung dan Trijono (2007:3)

   Definisi pembangunan adalah suatu proses yang ditujukan untuk memenuhi keperluan mendasar manusia, baik pada tingkat individu hingga tingkat kolektif, dengan prosedur yang tidak mengakibatkan kekacauan baik pada tatanan kehidupan masyarakat maupun lingkungan alam.

5. Rogers (Rochajat, dkk:2011:3)

   Rogers, sebagaimana dikutip oleh Rochajat et al. (2011), berpendapat bahwa pembangunan merupakan transformasi penting menuju struktur sosial dan ekonomi yang mencerminkan keinginan dan aspirasi suatu bangsa. Gagasan ini menggarisbawahi pentingnya kemajuan menuju masa depan yang lebih sejahtera dan adil, yang mencerminkan visi bersama dan komitmen untuk kemajuan.

## 2.4 Perencanaan Pembangunan

### 2.4.1 Definisi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu bangsa untuk generasi yang akan datang, dengan menambah pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, mengurangi ketidakseimbangan pendapatan dan kesejahteraan, dan juga membuka lebih banyak kesempatan kerja. Tujuannya adalah untuk mengubah

negara berkembang menjadi negara yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mark Turner dan David Hulme menggambarkan perencanaan pembangunan sebagai proses memodernisasi masyarakat dengan menguasai teknologi dan mengubah organisasi sosial, yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan stabilisasi politik yang identik dengan dunia barat.

Selanjutnya, Coralie Bryant dan Louise G. Whait mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membentuk masa depan memiliki berbagai konsekuensi. Conyers dan Hills mendefinisikan proses berkelanjutan di mana pengguna sumber daya yang berbeda membuat pilihan untuk mencapai tujuan masa depan yang spesifik bersama.

## 2.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

### 2.5.1 Definisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah lembaga teknis yang memiliki spesialisasi di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Dipimpin oleh seorang pimpinan instansi daerah yang bertanggung jawab dan diawasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Badan ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Davidov dan Rainer, sebagaimana dikutip oleh Ateng Syafruddin, perencanaan merujuk pada suatu metode untuk mengidentifikasi tindakan yang tepat. Oleh karena itu, proses perencanaan terdiri dari tiga tingkat pilihan yang tersedia: Pertama, tujuan

dan syarat harus dipilih. Kedua, sekelompok opsi yang sejalan dengan ketentuan umum ini harus dipertimbangkan dan alternatif yang ideal harus dipilih. Ketiga, tindakan harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula menurut Surhayanto (2000:65), beliau mendefinsikan pembangunan merupakan proses peralihan dari satu keadaan menjadi keadaan yang lebih diinginkan. Ini juga bisa dilihat sebagai proses kolaboratif yang bertujuan secara legal memberikan lebih banyak kesempatan bagi individu untuk mengejar ambisi terbaik mereka.

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan rencana pembangunan alam, seperti yang dikemukakan oleh Sjafrizal (2016), yaitu:

1. Dalam pembangunan terdapat dua pola yakni penyusunan dan penetapan rencana.
2. Tujuan pembangunan tidak realistis.
3. Teknik perencanaan masih memiliki banyak kekurangan.
4. Data yang dimiliki masih sangat terbatas.
5. Terjadi krisis ekonomi dan bencana alam.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bappeda mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dimulai dengan mengidentifikasi dan menentukan tujuan, menetapkan struktur ekonomi makro, dan mengembangkan struktur peraturan, kelembagaan, dan pendanaan yang selaras dengan kebijakan bupati dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD). Selain itu, keputusan musyawarah akan disinkronkan untuk mendorong sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
c. Koordinasi dan kolaborasi perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan komprehensif yang melibatkan semua tingkatan pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, bersama dengan sektor swasta, dalam melaksanaan kegiatan pembangunan nasional;
d. Memfasilitasi upaya penelitian kolaboratif dengan universitas, pusat studi, dan instansi penelitian untuk meningkatkan potensi daerah dan menumbuhkan daya saing;
e. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
f. Pengawasan rutin dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

h. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan Bappeda; dan
i. Pelaporan, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

## 2.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### 2.6.1 Definisi UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 dari UU, UU tersebut mendefinisikan Usaha Mikro sebagai usaha mandiri yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang memenuhi kriteria tertentu. Usaha Kecil juga merupakan badan ekonomi produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan yang berdiri sendiri dan tidak berafiliasi dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Konsep Usaha Menengah mengacu pada kegiatan ekonomi mandiri dan sejahtera yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang tidak berafiliasi dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini diatur oleh Undang-undang saat ini, yang menentukan kriteria tertentu mengenai kekayaan bersih dan penjualan tahunan. Tambunan (2012) menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha mandiri dan produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Klasifikasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) biasanya ditentukan oleh nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omzet tahunan rata-rata, atau

jumlah karyawan tetap. UMKM merupakan industri yang memajukan ekonomi kerakyatan serta memberikan peluang bagi hampir semua sektor masyarakat untuk berpartisipasi. Kontribusi UMKM terhadap pendapatan daerah tidak bisa dianggap remeh, karena peranannya cukup signifikan. Namun, bisnis ini sering menghadapi tantangan seperti rendahnya kesejahteraan para pelakunya, lokasi bisnis yang tidak menguntungkan, dan praktik penjualan yang mengganggu ketertiban umum. Sangat penting bagi kita untuk mengatasi hambatan ini dan mendukung UMKM secara bermartabat dan berkelanjutan. Pemerintah disini berperan sebagai otoritas tertinggi yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun kesejahteraan pelaku UMKM. (Kurniawati, 2010).

### 2.6.2 Kriteria UMKM

Sesuai pedoman yang dituangkan dalam Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008, terdapat tiga kriteria berbeda yang mencakup kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah untuk yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah untuk yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah untuk yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan tanggal 27 Juni 1994 Nomor 316/KMK 016/1994, Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha perorangan atau badan usaha yang telah beroperasi dan memperoleh penghasilan atau omzet tahunan sampai dengan Rp600.000.000,- atau memiliki aset senilai Rp600.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha). Contoh entitas tersebut antara lain Koperasi, Firma, CV dan PT juga dapat digolongkan sebagai Usaha Kecil.

### 2.6.3 Klasifikasi UMKM

Dalam pertumbuhannya, kelompok usaha dengan jumlah terbanyak ini telah menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kelompok UMKM untuk berkolaborasi dan saling mendukung untuk memperkuat usaha kolektif mereka. Ada beberapa kategori UMKM yaitu:

a. Livelhood Activities, ialah UMKM dengan manfaat untuk menciptakan peluang dan sumber penghasilan dari sektor informal. Pedagang kaki lima menjadi contoh utama dari hal ini.
b. Micro Enterprise, ialah UMKM dengan ide kreatif tapi kurang memiliki keterampilan kewirausahaan.
c. Small Dynamic Enterprise, ialah UMKM yang memiliki pola pikir kewirausahaan dan memiliki kemampuan untuk mempekerjakan tenaga kerja subkontrak hingga urusan ekspor.
d. Fast Moving Enterprise, ialah UMKM yang dijiwai dengan jiwa kewirausahaan siap untuk bertransformasi dari usaha sederhana menjadi pelaku industri yang tangguh.

### 2.6.4 Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia menjanjikan pertumbuhan yang besar, dengan peluang pasar yang luas dan sumber daya yang melimpah seperti bahan baku dan tenaga kerja yang besar. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, sangat penting untuk menerapkan strategi manajemen yang efektif, merencanakan kesuksesan dengan hati-hati, dan senantiasa menambah pengetahuan dan keahlian yang mendalam. Dengan mengutamakan kesinambungan, efisiensi, dan inovasi, pemilik usaha kecil dapat mengatasi hambatan dan mencapai kesuksesan yang berkesinambungan.

Dalam bukunya, Pandji Anaroga (2002) memberikan gambaran menyeluruh tentang ciri-ciri sektor bisnis, yaitu:

a. Margin operasi tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan pasar.

b. Modal yang dimiliki masih sangat terbatas.
c. Sistem pembukuan yang digunakan oleh administrasi sudah ketinggalan zaman dan tidak memadai, yang akhirnya berdampak negatif pada efisiensinya.
d. Kurangnya pengalaman manajemen bisnis dan manajerial.
e. Ketidakmampuan untuk mencapai pengurangan biaya dalam kurun waktu yang lama disebabkan perekonomian yang tidak signifikan.
f. Kurangnya keterampilan marketing dan negoisasi.
g. Perusahaan hanya memperoleh dana dari pasar modal terkecil melalui sistem administrasi terbatas. Perusahaan harus mematuhi sistem administrasi yang transparan untuk berpartisipasi di pasar modal.

## 2.7 Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Gede Diva (2009) mengemukakan bahwa pemerintah dapat memainkan peran yang berguna dan efisien dalam mendorong pertumbuhan UMKM dengan bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator:

1. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

   Pemerintah harus membantu usaha kecil (UMKM) berkembang dengan memberikan dukungan di bidang-bidang seperti produksi dan pendanaan. Jika UMKM membutuhkan pelatihan atau bantuan keuangan, pemerintah harus membantu mereka menemukan solusi dengan memastikan bahwa UMKM mempertahankan kemandiriannya. Dalam hal memfasilitasi UMKM, pemerintah dapat menawarkan tiga jenis dukungan yaitu bantuan keuangan atau subsidi, hak istimewa atau

kekuasaan khusus selama periode transisi hukum, dan kebijakan khusus. Tingkat dukungan pemerintah akan tergantung pada bagaimana persepsi mereka terhadap pentingnya UMKM tersebut.

2. Peran Pemerintah sebagai regulator

   Tugas pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan yang membantu pertumbuhan UMKM. Mereka melakukan ini dengan mengatur suku bunga dan menciptakan aturan untuk persaingan yang sehat. Peran pemerintah adalah memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar dan secara aktif menegakkan aturan. Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai regulator membedakan kekuasaan pembuat kebijakan menjadi dua kategori yaitu kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki fungsi pengaturan bagi individu yang berada di wilayah hukumnya.

3. Peran Pemerintah sebagai katalisator

   Fungsi pemerintah daerah sebagai katalisator pertumbuhan UMKM adalah untuk mempercepat proses pengembangannya menjadi usaha yang bergerak cepat (Fast-moving enterprise). Fast-moving enterprise mengacu pada UMKM dengan pola pikir kewirausahaan dan potensi untuk berkembang menjadi usaha besar. Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah mungkin terlibat dalam proses tersebut sebagai katalisator, tetapi mereka tidak mengelola keseluruhan proses transformasi. Tidak disarankan bagi pemerintah daerah untuk terlalu

terlibat dalam proses perubahan karena campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi dapat menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian akibat pergerakan pasar yang tidak wajar. enting bagi pasar untuk berfungsi secara mandiri. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi perannya sebagai katalisator, antara lain dengan memberdayakan komunitas kreatif untuk produktif, memberikan apresiasi kepada UMKM, menciptakan infrastruktur intelektual untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka, dan memberikan modal dalam bentuk modal ventura atau modal bergulir. (Gede Diva, 2009).

# BAB III

# ANALISIS DESKRIPTIF

## 3.1 Data Umum

### 3.1.1 Sejarah BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan, penelitian, dan pengembangan, dan merupakan bagian penting dari otonomi daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klate (BAPPEDALITBANG) didirikan melalui Keputusan Daerah Kabupaten Klate Nomor 7 Tahun 2021. Perda ini menggantikan Perda Nomor 8 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan kerangka Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Aparat. Peran lembaga tersebut lebih lanjut diatur di Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 yang mengatur mengenai struktur organisasi, fungsi, tugas, dan cara kerja lembaga. Hal ini tentunya dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan melayani masyarakatnya. BAPPEDALITBANG di Kabupaten Klaten memiliki tugas untuk meringankan kerja Bupati selama mengatur tugas pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian, perencanaan, serta pengembangan daerahnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan pedoman teknis yang berkaitan dengan perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
2. Penerapan regulasi teknis pada tahapan perencanaan dan inovasi.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan baik bidang perencanaan maupun bidang penelitian dan pengembangan.
4. Pelaksanaan pengkajian dan pelaporan dibidang penelitian serta bidang perencanaan juga bidang pengembangan.
5. Melakukan tugas pemerintahan tambahan yang diamanatkan oleh Bupati yang berkaitan dengan tanggung jawabnya.

Peraturan yang digunakan dalam Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan SOTK Bappedalitbang Kabupaten Klaten antara lain :

1. Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
2. Perbup Nomor 73 tentang SOTK Bappedalitbang

### 3.1.2 Struktur Organisasi Bappeda Klaten

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Kepala BAPPEDALITBANG

2. Sekertaris, terdiri atas :

a) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

b) Kasubbag Keuangan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Fungsional, terdiri atas :

a) Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan Daerah

b) Kasub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian

c) Kasub Koordinator Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

d) Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

e) Kasub Koordinator Perekonomian, dan Sumber Daya Alam

f) Kasub Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan

g) Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

h) Kasub Koordinator Pemerintahan

i) Kasub Koordinator Pembangunan Manusia

j) Kabid Penelitian dan Pengembangan

k) Kasub Koordinator Penelitian dan Pengkajian

l) Kasub Koordinator Pengembangan dan Inovasi

### 3.1.3 Visi dan Misi Bappedalitbang Klaten

Maksud dan tujuan BAPPEDALITBANG diwujudkan dalam visi dan misinya, yaitu:

1. Visi

   Visi yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 didasarkan pada gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam proses pengesahannya sebagai kepala daerah. Visi tersebut berbunyi: “Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”

2. Misi

   Sedangkan Misi dari BAPPEDALITBANG dengan tujuan mencapai visi tersebut dijabarkan yakni:

A. Mewujudkan susunan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;

B. Melaksanakan pengelolaan pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi;

C. Peningkatan kemandirian ekonomi daerah berbasis ekonomi sektor unggulan daerah.

D. Pemerataan sarana prasarana daerah yang bermutu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

E. Pemahaman tentang kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan spesifik gender;

F. Memahami kualitas pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) di Kabupaten Klaten telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mencapai visi "Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera" sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Misi kedua RPJMD tentang tanggung jawab dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bercirikan profesionalisme, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan sikap anti korupsi yang kuat..

### 3.1.4 Logo BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten

**Gambar 3. 1 Logo BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten**

Sumber: Data Perusahaan

Logo setiap lembaga pemerintah dijiwai dengan simbolisme yang mendalam dan beragam, mencakup banyak implikasi yang signifikan, begitu pula dengan logo BAPPEDALITBANG yang memiliki arti diantaranya:

1. Mahkota Kerajaan: memiliki arti Kebesaran/keagungan cita-cita.
2. Orang yang duduk bersemedi dengan rambut yang terurai, kaki membentuk pita dengan tulisan KLATEN: yakni menggambarkan jiwa yang mempunyai keinginan teguh dan suci untuk mewujudkan harapan dari Kabupaten Klaten.
3. Lambing perisai berwarna kuning keemasan dengan bingkai berbentuk segi lima berwarna putih: yaitu melambangkan

perjuangan masyarakat untuk sampai ke zaman kejayaan Toto Tentrem Kerto Raharjo dengan berpegang teguh pada nilai kebijakan, kejujuran, keadilan dan kebenaran.

4. Lambing Kapas dan Padi: yakni bermakna supaya masyarakat Klaten memiliki hasil bumi yang baik dengan hasil pertanian dan perkebunan. Didalamnya Padi berwarna kuning emas berjumlah 28 sedangkan kapas berwarna putih berjumlah 10.

5. Aksen aksara jawa: berbunyi Tumego Toto Anggotro Raharjo artinya 0591 (1950) yakni menunjukkan hari pendirian dan pengesahan kabupaten Klaten (di tanah jawa) atau tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1950.

6. Gunungan berwarna biru muda: Gunungan ini melambangkan ketentraman dan kecemerlangan warna biru muda, menandakan peringatan terbentuknya Kabupaten Klaten dan dimulainya era baru yang damai dan tenang.

7. Lambing rantai berwarna kuning yang melingkari batang padi dan kapas: yakni melambangkan terwujudnya kebersamaan dan kerja sama antar masyarakat.

8. Lambang bambu runcing dan api: Itu adalah simbol dari usaha yang sungguh-sungguh dan penuh semangat untuk mencapai tujuan yang mulia dan bajik.

9. Tugu warna putih: lambang ini memiliki makna menghormati

perjalanan yang sulit yang telah ditempuh selama ini.

10. Lambang pohon beringin dengan akarnya yang berwarna hijau: konsep yang dimaksud adalah mewujudkan tujuan mulia menjaga dan memelihara masyarakat, dengan tujuan akhir membina lingkungan sosial ekonomi yang adil dan sejahtera.

11. Simbol berwarna hitam yang menjadi latarbelakang lambang: Kata 'hitam' memiliki konotasi mendalam tentang kekuatan yang tak tergoyahkan, stabilitas yang tak tergoyahkan, dan makna abadi. Ini berfungsi sebagai simbol yang kuat dan abadi, menggambarkan substansi dan niat.

### 3.1.5 Struktur Organisasi

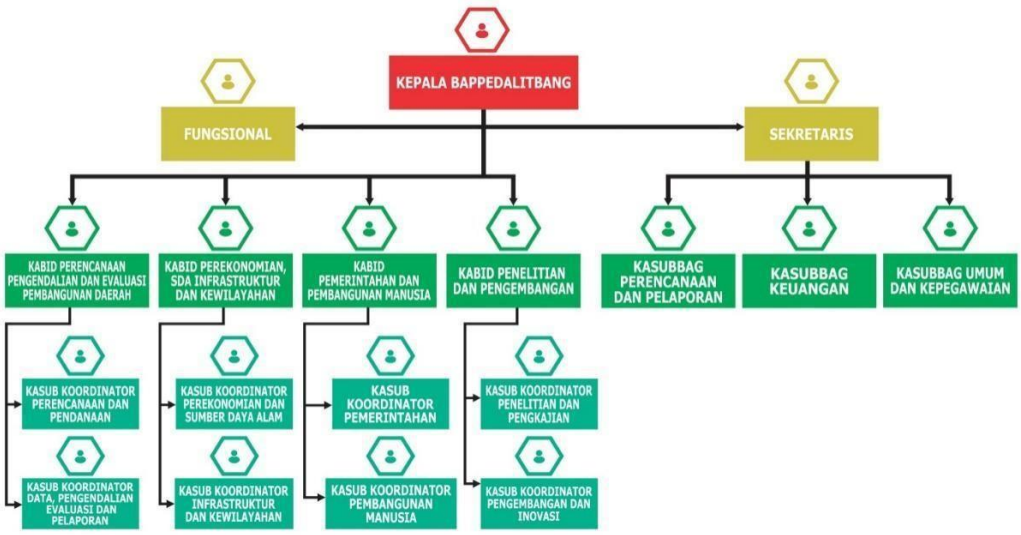


**Gambar 3. 2 Struktur Organisasi BAPPEDA**

Sumber: Data Perusahaan

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Klaten nomor 73 Tahun

2021 yang baru, perlu dicatat bahwa struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) disusun dengan hati-hati untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Secara khusus, BAPPEDALITBANG telah diberi tugas penting untuk membantu Bupati dalam menerapkan strategi pemerintahan yang efektif, serta mempelopori inisiatif penelitian dan pengembangan.

Selama proses pelaksanaan kewajiban tersebut, fungsi yang dimiliki oleh BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan pedoman teknis yang berkaitan dengan perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
2. Menjalankan penerapan regulasi teknis pada tahapan perencanaan dan inovasi.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan baik bidang pengembangan dan perencanaan maupun bidang penelitian.
4. Melakukan pengkajian dan pemberitahuan dibidang bidang pengembangan dan perencanaan maupun bidang penelitian.
5. Melaksanakan tugas kedinasan tambahan yang diserahkan oleh Bupati berkaitan dengan tanggung jawabnya.

### 3.1.6 Tugas dan Wewenang Bappedalitbang Klaten

**1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Yakni bertindak khususnya mengambil peran kepemimpinan dalam

pemenuhan kewajiban dan tugas Badan Perencanaan Daerah.

2. **Sekretariat Badan Perencanan Pembangunan Daerah**

   Sekretaris bertanggung jawab dengan Kepala Badan dan dipercayakan dengan tugas vital menyusun materi koordinasi dengan cermat dan memberikan layanan teknis administrasi dengan kemampuan maksimal ke semua unit kerja pemerintah daerah dan pusat di lingkungan Badan Perencanaan Daerah. Sekretariat dibagi menjadi beberapa divisi yaitu:

a. Bagian Persiapan Perencanaan Kegiatan mengemban tanggung jawab penting untuk membantu Sekretaris dalam menyusun bahan rencana kegiatan yang unggul, menyusun program kerja yang efisien, merumuskan RAPBD, dan dengan cermat mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait yang merupakan bagian integral dari perencanaan daerah.
b. Bagian Keuangan, bertanggung jawab mengelola urusan keuangan dengan administrasi yang baik. Termasuk didalamnya tugas-tugas seperti membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran, memelihara pembukuan yang akurat, memastikan akuntabilitas, dan menyediakan laporan keuangan yang terperinci seputaran lingkungan BPD.
c. Bagian Umum, bertanggung jawab menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan komunikasi dan dokumentasi, manajemen personalia, manajemen internal serta pemeliharaan peralatan.

**3. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian**

Bagian ini bertanggung jawab atas tugas antara lain mengumpulkan data, menganalisis, memantau dan mengevaluasi data, menyusun laporan program daerah, mengumpulkan statistik dan dokumentasi, melakukan penelitian, serta menilai dan mengembangkan program pembangunan daerah yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat berbagai divisi yaitu sebagai berikut:

a. Devisi Bidang Pengolah dan Pelaporan, bertanggung jawab untuk melakukan analisis, mengolah, mengevaluasi, memantau, dan menyiapkan data sebagai bahan pelaporan realisasi program yang ada didaerah.
b. Devisi Bidang Statistika dan Dokumentas, bertugas untuk mengumpulkan informasi dan bukti tentang keberhasilan pelaksanaan program didaerah tertentu.
c. Devisi Bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, tanggung jawabnya adalah meneliti, mengevaluasi dan membuat program untuk daerah yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari rakyat.

**4. Bidang Ekonomi**

Bagian Perekonomian memiliki tanggungjawab oleh Kepala Badan dan bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan, pertambangan, energi, industri, perdagangan, koperasi, pertumbuhan bisnis, investasi, dan pendapatan daerah. Sektor ini mempunyai berbagai subdivisi yakni:

a. Devisi Bidang Pertanian dan Kehutanan, bertanggung jawab untuk memimpin dan menyiapkan bahan untuk pengembangan rencana program pertanian dan kehutanan, serta penggunaan sumber daya air di sektor-sektor tersebut.
b. Devisi Bidang Pertambangan, Energi, Industri, Perdagangan dan Koperasi, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas mereka antara lain membuat bahan untuk rencana dan program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam serta energi.
c. Devisi Bidang Pengembangan Usaha dan Penanaman Modal, bertanggung jawab atas bidang ini dan melapor kepada Kepala Bidang. Tanggung jawab mereka termasuk menyiapkan rencana dan program untuk pengembangan bisnis dan investasi, serta mengembangkan sumber daya bisnis di daerah.

**5. Bidang Sosial dan Budaya**

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas mereka adalah merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan informasi, pendidikan, budaya, kesejahteraan, ketenagakerjaan, dan pemerintahan. Ada beberapa divisi dalam sektor ini yaitu:

a. Devisi bagian informasi, Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi dan melaksanakan tugas-tugas yakni merumuskan komponen penting yang diperlukan untuk menyusun rencana program pada

berbagai aspek kehidupan manusia seperti informasi, media, interaksi sosial, pendidikan, kesejahteraan mental dan spiritual, pertumbuhan pribadi, kemajuan budaya, dan memastikan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

b. Devisi bagian Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Ketenagakerjaan, diserahi tanggung jawab penting untuk mengkurasi bahan-bahan yang diperlukan untuk merumuskan rencana program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang fokus mencakup aspek-aspek krusial seperti kesehatan, perumahan, pemberdayaan perempuan, penyediaan KB yang komprehensif, penciptaan lapangan kerja, dan fasilitasi transmigrasi.

c. Devisi bagian Bidang Pemerintahan dan Kependudukan, tanggung jawabnya adalah menciptakan rencana yang diperlukan untuk mengembangkan rencana program yang berkaitan dengan pemerintahan, aturan dan hukum, serta masyarakatnya.

**6. Bidang Fisik dan Prasarana**

Bidang ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyelenggarakan upaya perencanaan di berbagai bidang, seperti pekerjaan umum, transportasi, pariwisata, tata kelola ruang, penggunaan lahan, dan perlindungan SDA dan lingkungan. Bidang ini terdiri dari beberapa divisi:

a. Devisi Bidang Pekerjaan Umum, memiliki tanggung jawab pekerjaan untuk mengumpulkan sumber daya untuk pengembangan strategi dan

proyek yang berkaitan dengan pekerjaan umum seperti konstruksi, pengelolaan air, dan pemeliharaan lingkungan.

b. Devisi Bidang Perhubungan dan Pariwisata, memiliki tanggung jawab yaitu mengumpulkan bahan untuk membuat rencana dan program yang berkaitan dengan transportasi dan pariwisata, yang meliputi infrastruktur darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi, serta infrastruktur lalu lintas dan pariwisata.

**7. Devisi Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Tim ini bertanggung jawab untuk merancang bahan untuk memfasilitasi pembuatan berbagai rencana dan inisiatif yang berkaitan dengan tata ruang, penggunaan lahan, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan.

## 3.2 Data Khusus

### 3.2.1 Peranan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten dalam Merencanakan Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah.

Peranan BAPPEDALITBANG dalam perencanaan pembangunan UMKM yaitu sebagai fasilitator, dalam perannya sebagai fasilitator BAPPEDALITBANG dapat memberikan bantuan dalam memajukan serta mengembangankan UMKM bantuan tersebut berupa memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM di bidang masing-masing tergantung mana yang lebih membutuhkan pelatihan, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM, membantu dalam proses perijinan label halal pada suatu produk

makanan, membantu dalam proses pemasaran/marketing antara lain lewat promosi melalui sosial media, atau pameran-pameran agar UMKM di Klaten bisa naik kelas dan lebih di kenal masyarakat luas baik dalam negeri, maupun luar negeri.

Ada beberapa klaster UMKM yang akan di branding oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten agar menjadi ciri khas/icon daerah Kota Klaten, antara lain produk dan industri seperti kain tenun tradisional, pembuatan pakaian, gerabah, furnitur, kerajinan logam, kreasi buatan tangan, makanan khas daerah sekitar gunung Merapi, dan desa-desa yang menarik wisatawan. Diharapkan dengan memanfaatkan model klaster dan mengidentifikasi kekhasan daerah, dukungan dan peningkatan UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan bermanfaat bagi sektor dan subsektor lainnya. Selain itu, pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan brand image yang unik bagi Kabupaten Klaten.

| Usaha Kecil Menengah | | satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah pengusaha | | | | | | |
| | Pengusaha Mikro/kecil | orang | 34.673 | 34.680 | 34.686 | 50.027 | 50.070 |
| | Pengusaha menengah | orang | 5.024 | 5.026 | 5.028 | 5.030 | 5.030 |
| 3 | Pertumbuhan usaha mikro | % | 0,062 | 0,072 | 0,077 | 0,098 | 0,111 |
| 4 | Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan | % | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,257 |
| 5 | Persentase usaha mikro yang dibina | % | 1,94 | 2,21 | 2,72 | 3,09 | 3,86 |
| 6 | Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/pendampingan | % | 0,017 | 0,049 | 0,058 | 0,046 | 0,06 |

**Tabel 3.1**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2016-2020**

### 3.2.2 Kendala yang Dialami Bappedalitbang Kabupaten Klaten Dalam Merencanakan Pembangunan UMKM

1. Regulasi yang berkembang begitu cepat sehingga sulit menerapkan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dikarenakan masyarakat masih awam dengan regulasi-regulasi yang selalu di *update.*
2. Perubahan sistem yg digunakan dalam perencanaan pembangunan (sudah di tentukan oleh pemerintah pusat) Kemendagri, Hal ini juga sangat menjadi kendala bagi BAPPEDALITBANG dalam menjalankan perencaan pembangunan UMKM di wilayah Kab. Klaten.

   Keterbatasan SDM ini adalah kendala yang seringkali di temui ketika mengadakan sosialisasi dan penerapan pembangunan UMKM. Terlebih saat ini telah memasuki era digital sehingga memaksa masyarakat yang belum paham tentang digital untuk menggunakan media digital.

# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan

Sehubungan dengan keikutsertaan penulis dalam program magang, mengenai tanggung jawab dan keterbatasan yang dihadapi Bappedalitbang Kabupaten Klaten dalam Merencanakan Pembangunan UMKM. Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan BAPPEDALITBANG dalam perencanaan pembangunan UMKM yaitu sebagai fasilitator, sebagai fasilitator BAPPEDALITBANG dapat memberikan bantuan dalam memajukan serta mengembangankan UMKM bantuan tersebut berupa memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM di bidang masing-masing tergantung mana yang lebih membutuhkan pelatihan, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM, membantu dalam proses perijinan label halal pada suatu produk makanan, membantu dalam proses pemasaran/marketing antara lain lewat promosi melalui sosial media, atau pameran-pameran agar UMKM di Klaten bisa naik kelas dan lebih di kenal masyarakat luas baik dalam negeri, maupun luar negeri.
2. Kendala dalam perencanaan pembangunan UMKM yaitu:
    a. Regulasi yang berkembang begitu cepat sehingga sulit menerapkan dan sosialisasi kepada masyarakat.
    b. Perubahan sistem oleh Kemendagri yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.

c. Keterbatasan SDM masyarakat yang belum paham tentang digitalisasi di era modern ini untuk menggunakan media digital.

## 3.2 Saran

a. Diadakannya sosialisasi rutin dan memfasilisitasi kepada masyarakat mengenai digitalisasi sehingga perlahan masyarakat bisa mengenal dan sadar akan pentingnya digitalisasi di era moden ini.
b. SDM BAPPEDALITBANG harus *up to date* dengan sistem perencanaan pembangunan sehingga ketika terjadi perubahan tidak akan berdampak bagi perencanaan pembangunan.
c. Melakukan promosi seperti pembuatan pamflet dengan mencantumkan manfaat atau hadiah yang di dapat jika mengikuti sosialisasi sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti sosialisasi.

# DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. 2002. Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil. Semarang: Rineka Cipta

Coralie Bryant dan Louise G. White, Manajemen Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1987.

Effendi, Bachtiar, 2002, Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan, Yogyakarta, Uhaindo dan Offset.

E.St Harahap, dkk. 2007. Kamus besar bahasa Indonesia. Bandung: Balai Pustaka, hlm: 854

Fakih, Mansour. 2001. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.

Gede, Diva: 2009 Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Bakrie School of Management : Jakarta

Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro. 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/198686/perbup-kab-klaten-no-73-tahun-2021

Kusnindar, A. A. (2018). PROFILING UKM DI KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI BASIS MENCIPTAKAN MODEL PEMBERDAYAAN UKM

YANG TEPAT SASARAN. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KMK.016/1994 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI MELALUI PEMANFAATAN DANA DARI BAGIAN LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten

Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten

Riyadi. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia

Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik).

Sjafrisal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada)

Tambunan, Tulus. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting.

Tarigan, R. 2006, Perencanaan Pembangunan Wilayah, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Trijono, Lambang.2007.Pembangunan Sebagai Perdamaian, Yayasan Obor Indonesia :Jakarta.

Teguh Yuwono, 2001, Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang.

Turner, Mark and Hulme, Davis. (1997). Governance, Administration and Development: Making the State Work. London: MacMillan Press.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 PASAL 1 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 PASAL 6 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

# LAMPIRAN

**Lampiran 1: Wawancara Untuk Mendapat Data**

**Lampiran 2: Foto Bersama Karyawan Setelah Wawancara**

**Lampiran 3: Kegiatan Senam Pagi**